



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT NATUNA-
NATUNA UTARA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:500.000

Batas Administrasi

- Batas Negara
- - - Batas Laut Teritorial Belum Diratifikasi
- - - - Batas Laut Teritorial
- - - - - Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- + Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif
- - - - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perlu Kesepakatan

Batas Wilayah Perencanaan

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

Batas Wilayah Provinsi

- - - Batas Wilayah Provinsi
- - - - Batas Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi

Batas Lain

- - - - Batas Indikatif Kawasan Strategis Nasional
- - - - - Batas Indikatif Pulau-Pulau Kecil Terluar

Alur Migrasi Biota Laut

- Alur Migrasi Penyu

Singkatan

P. = Pulau

Tg. = Tanjung

ARAHAN RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Budi Daya
- Kawasan Lindung**
- Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut

Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

- Lokasi Indikatif KSNT terkait Situs Warisan Dunia
- Batas Indikatif KSNT terkait Kawasan Signifikan secara Biologis dan Ekologis

RENCANA POLA RUANG LAUT DI WILAYAH YURISDIKSI

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U5Y Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- U8Y Zona Perikanan Tangkap
- U18Y Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- C3Y Kawasan Konservasi Maritim
- C6Y Daerah Perlindungan Biota Beruaya

Sumber Peta

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*.
- Peta Laut Indonesia Nomor 360 Tahun 2014 dan Peta Laut Indonesia 354 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL

RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 Zona Pariwisata
- U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- U6 Zona Pertambangan Mineral dan Batubara
- U8 Zona Perikanan Tangkap
- U9 Zona Perikanan Budi Daya
- U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut
- C2 Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan

Ketentuan Khusus

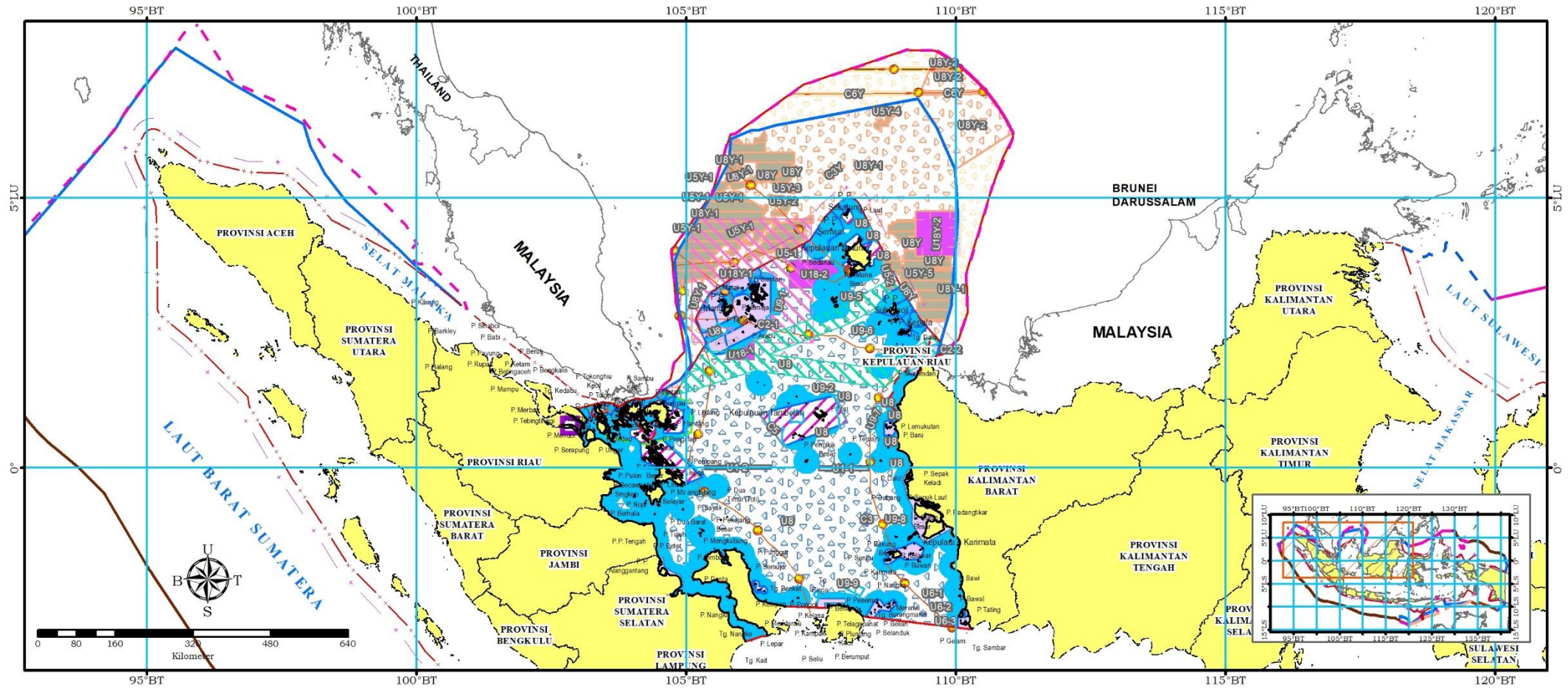
- Koridor Muri dan Midai
- Daerah Perikanan Tradisional

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



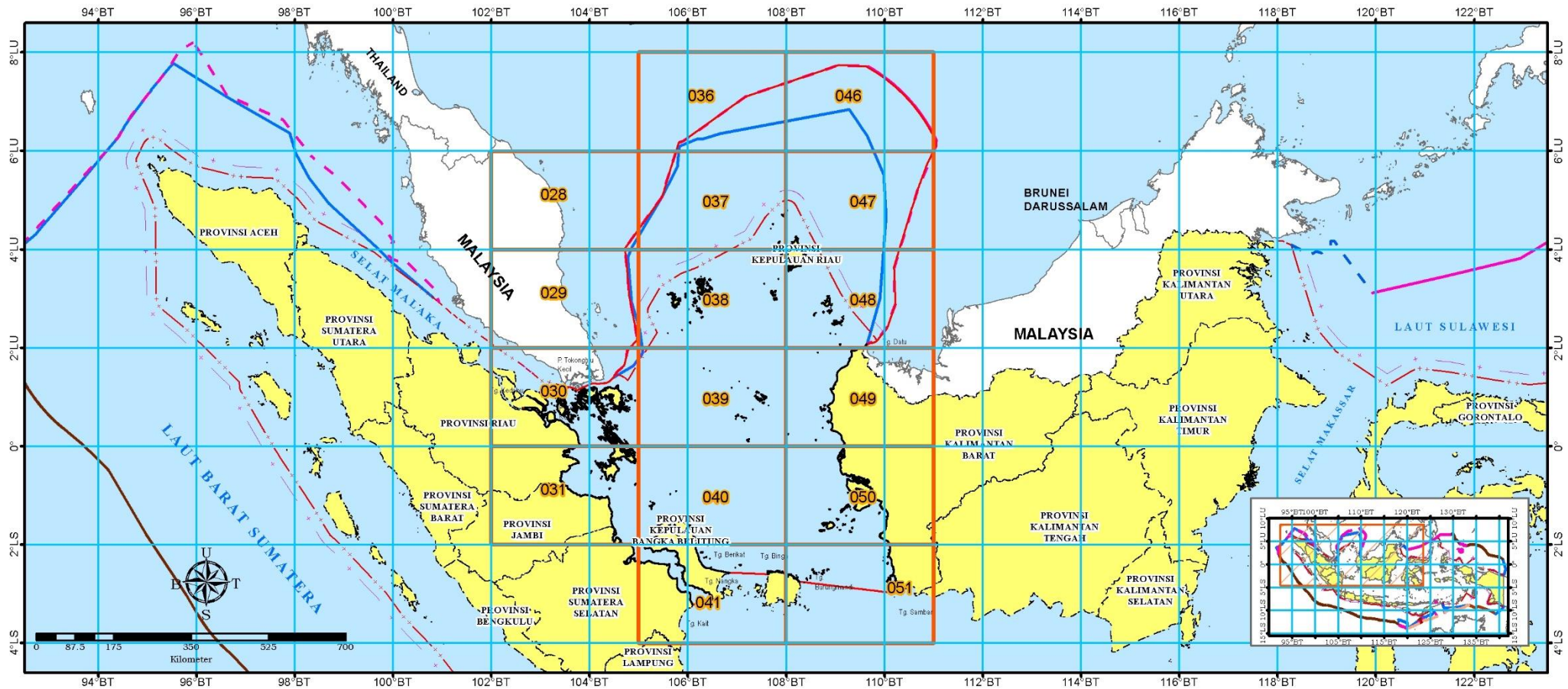
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

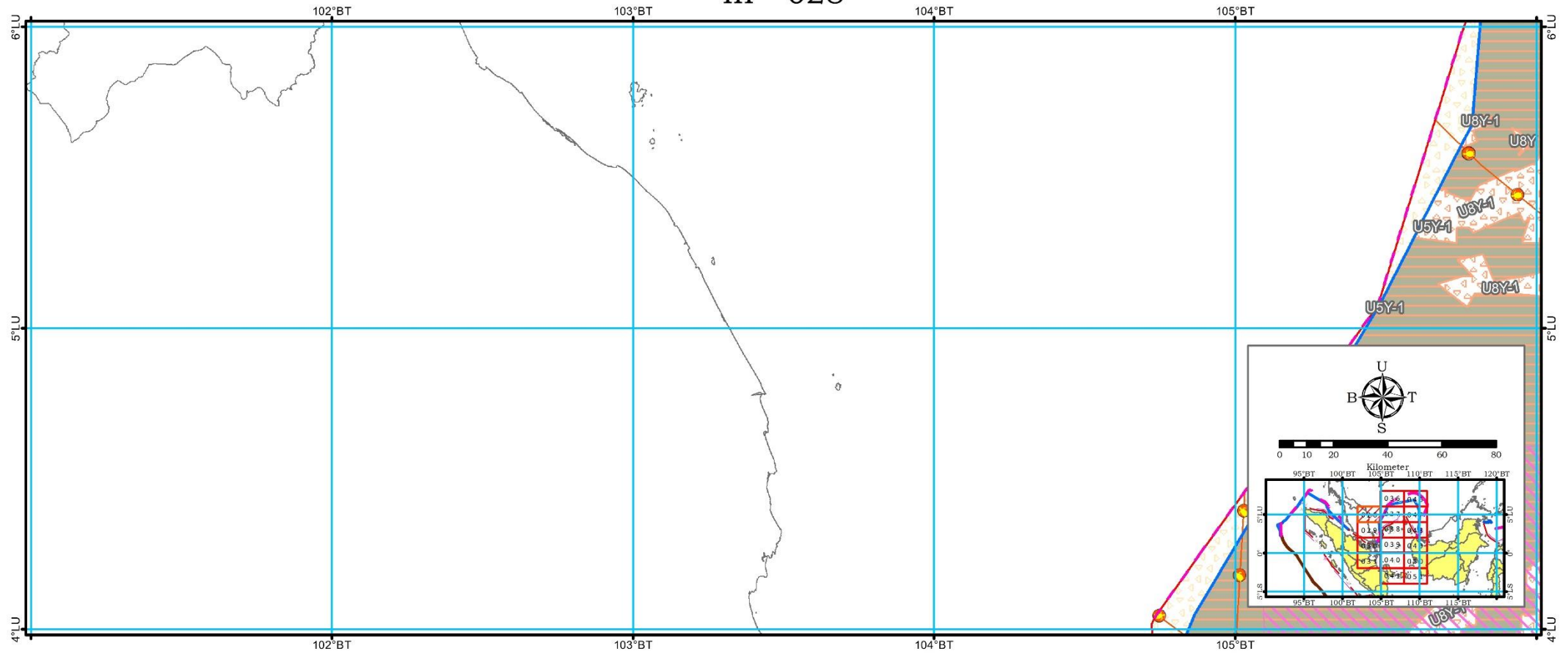
PETA INDEKS





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

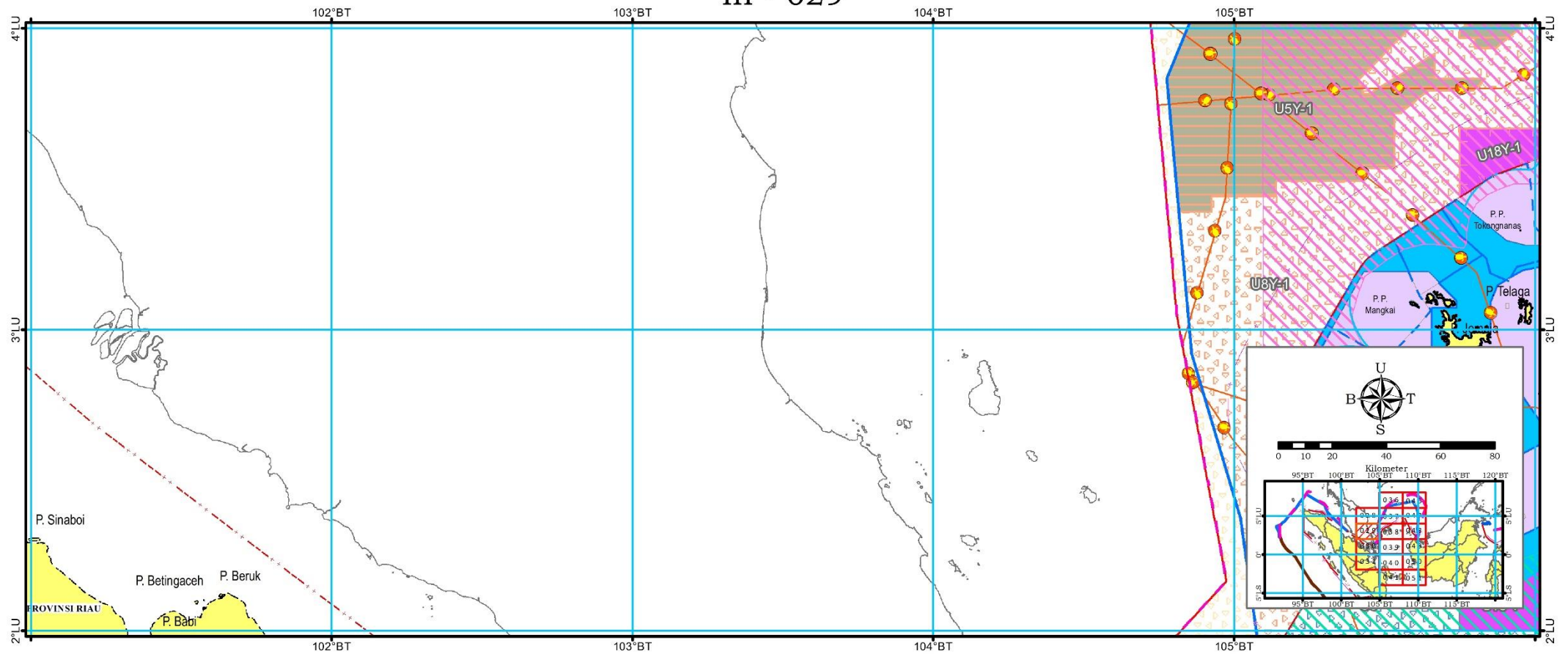
III - 028





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

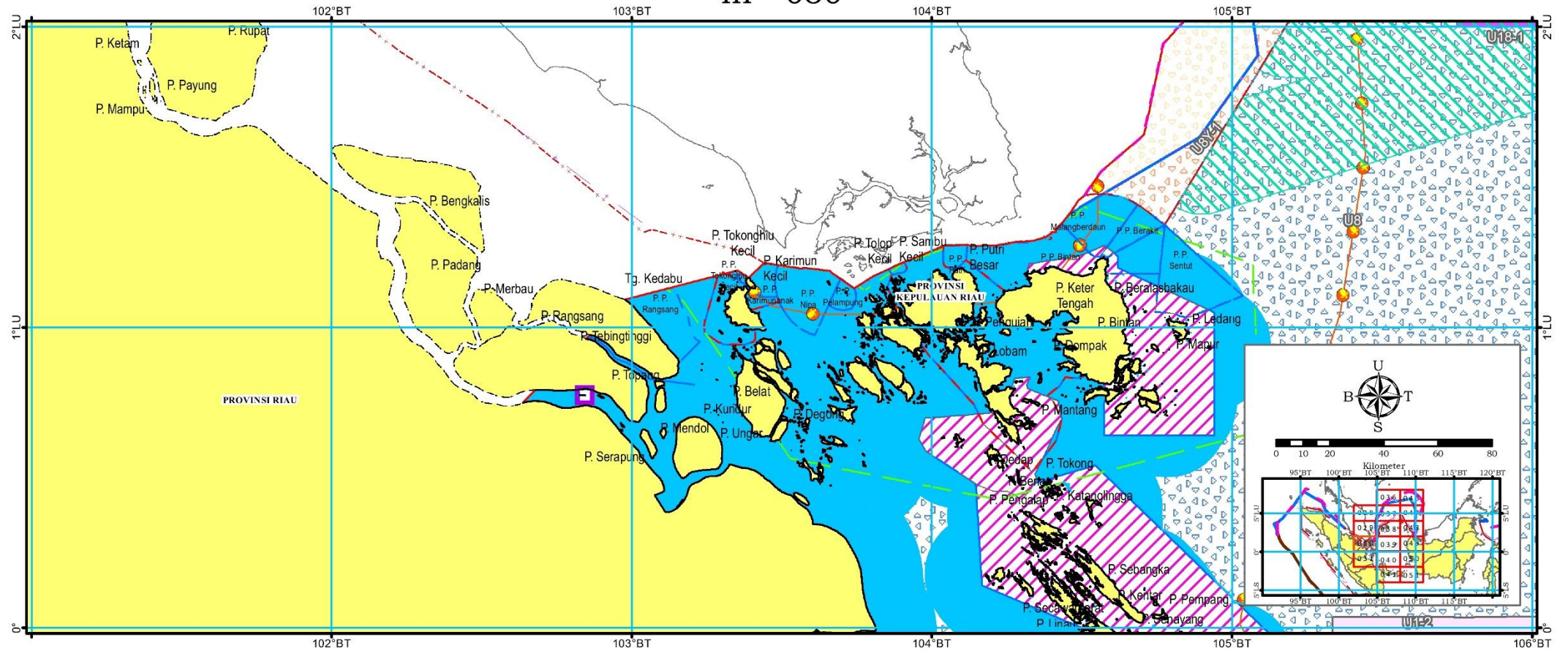
III - 029





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

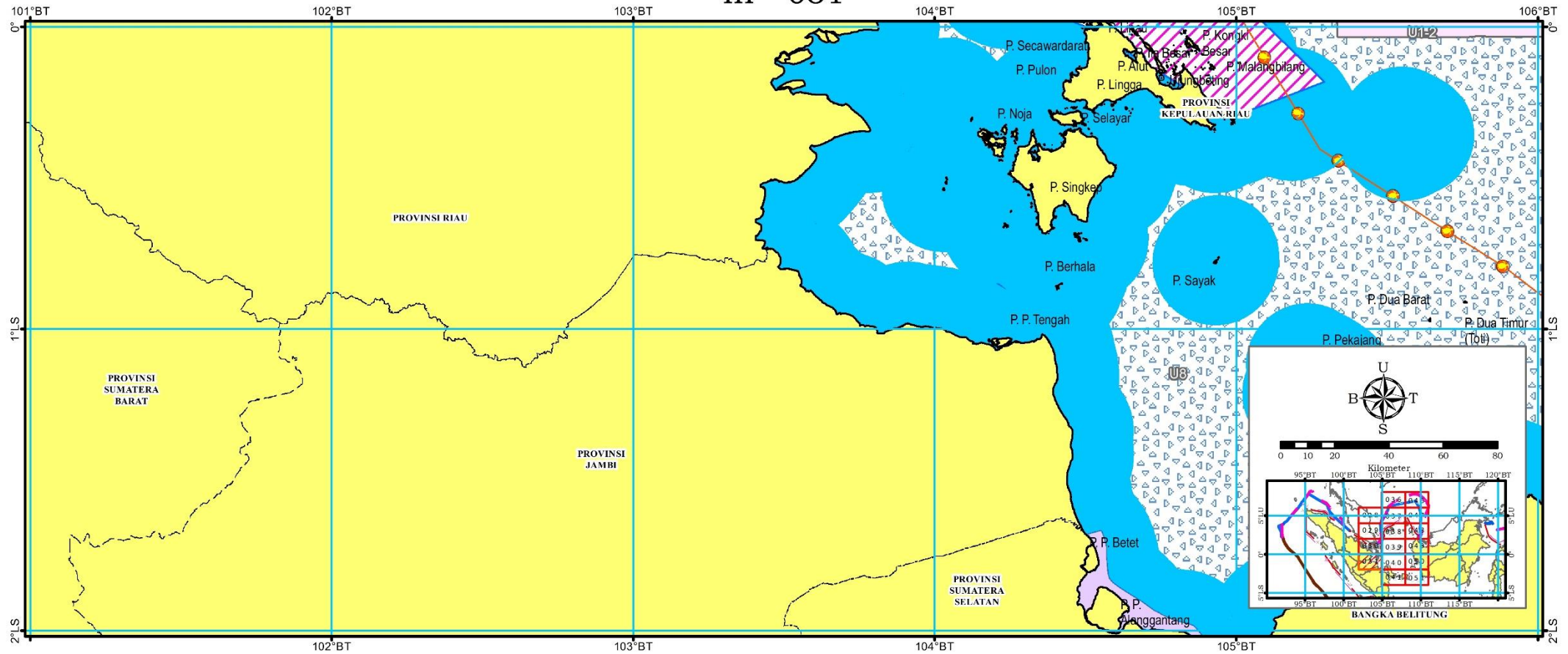
III - 030





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

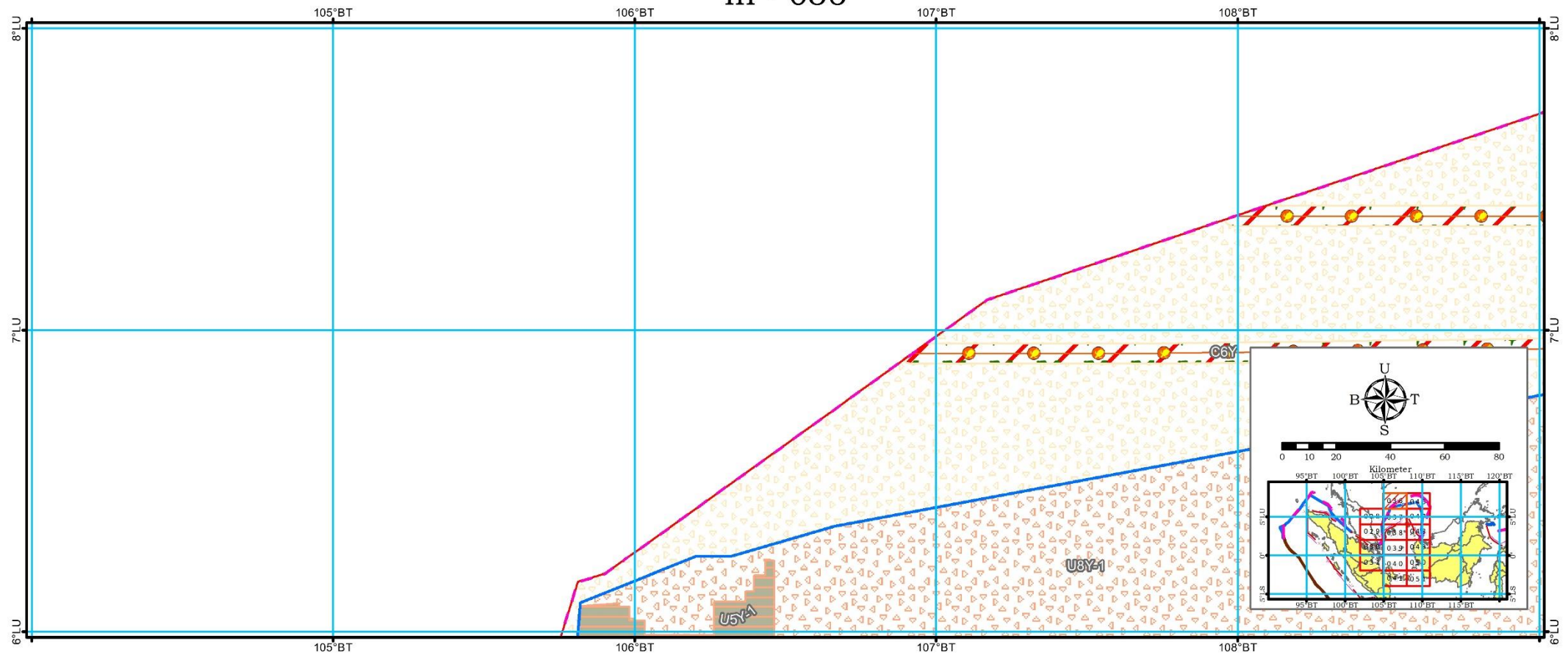
III - 031





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

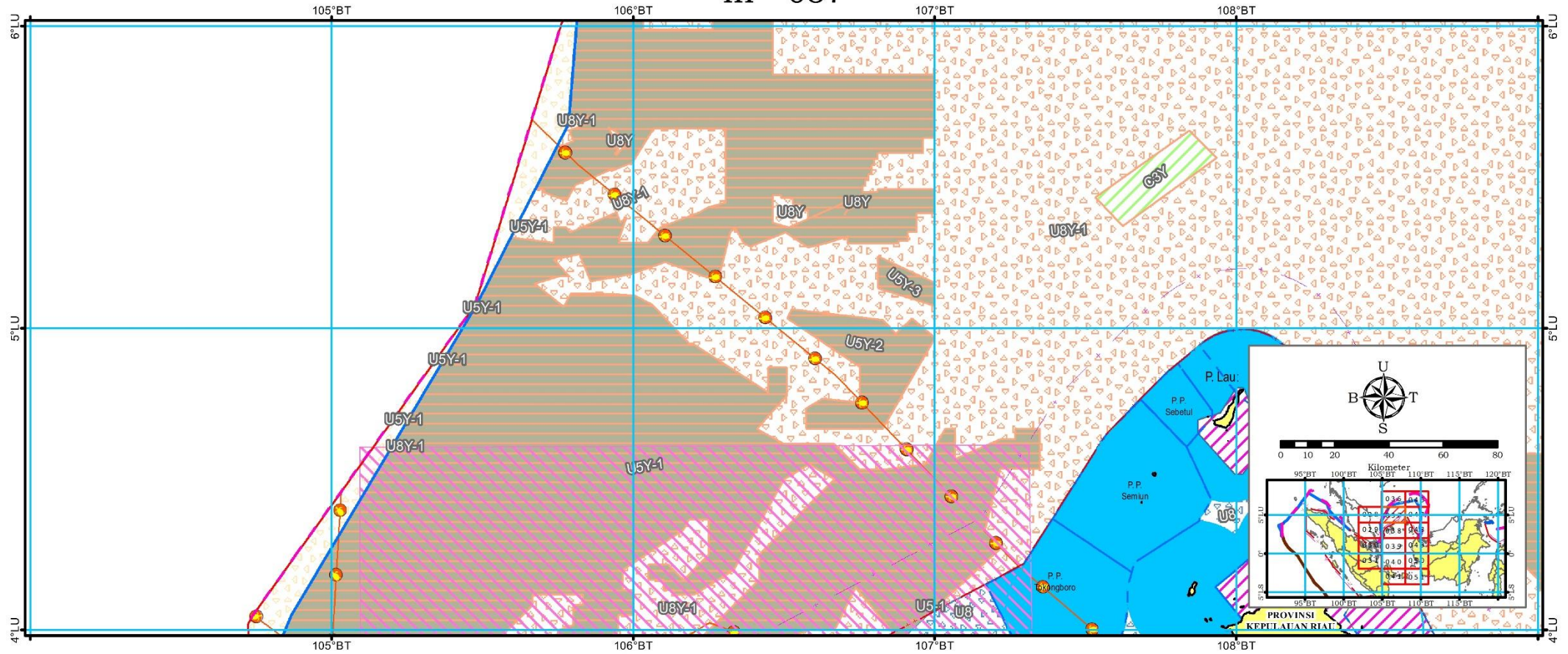
III - 036





PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

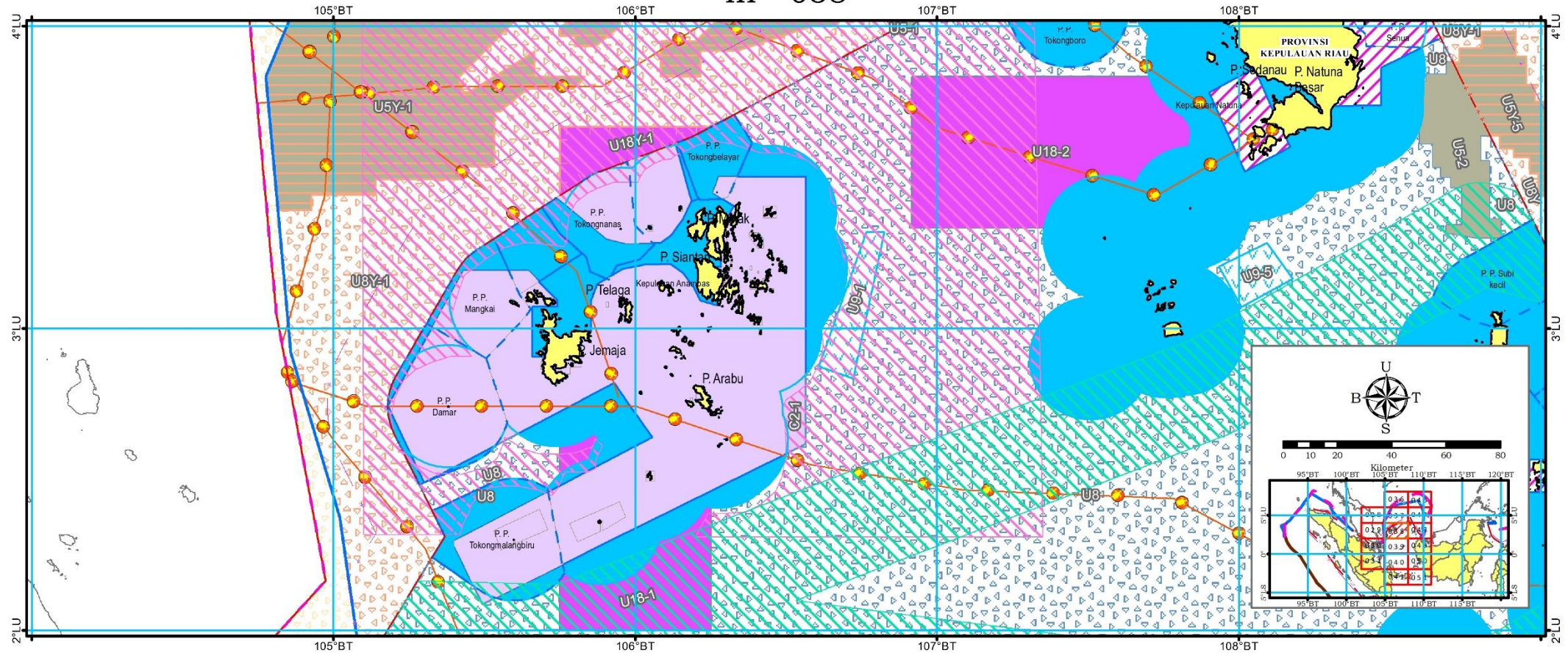
III - 037





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

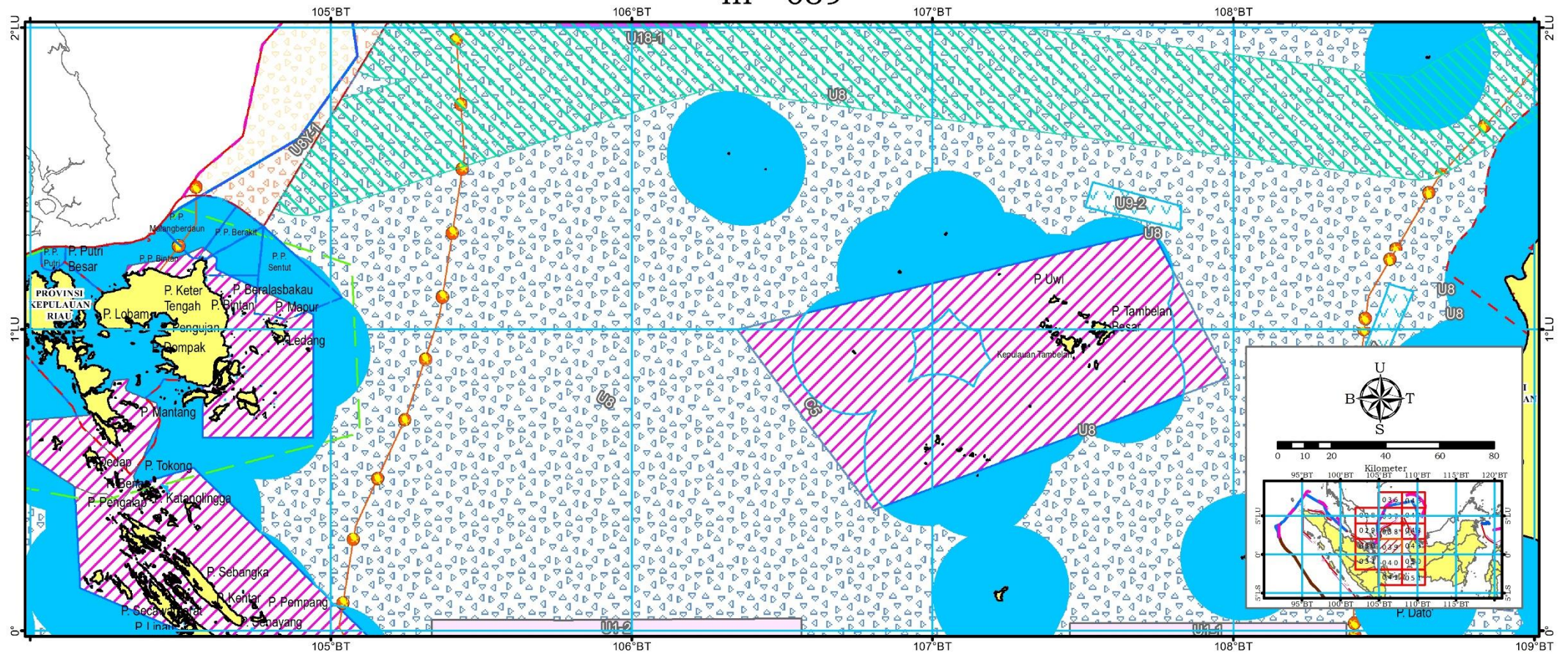
III - 038





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

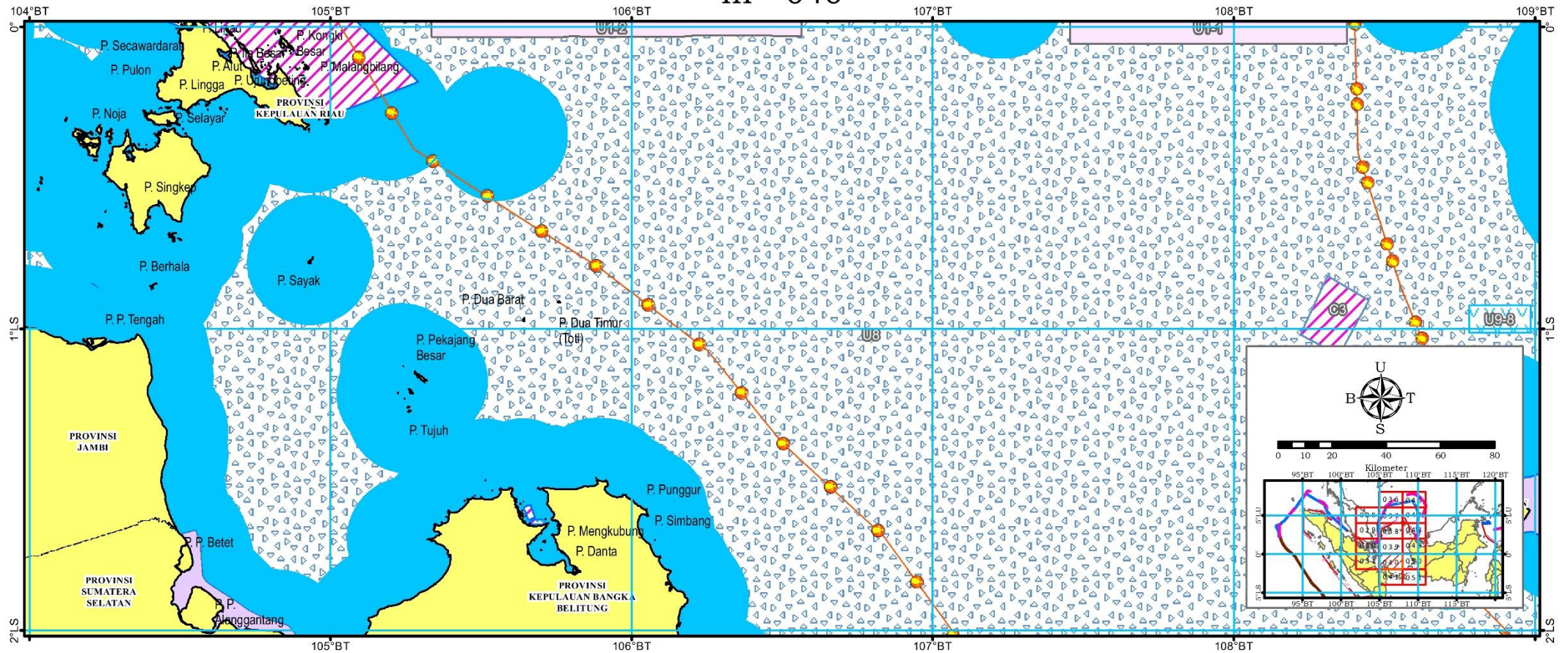
III - 039





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

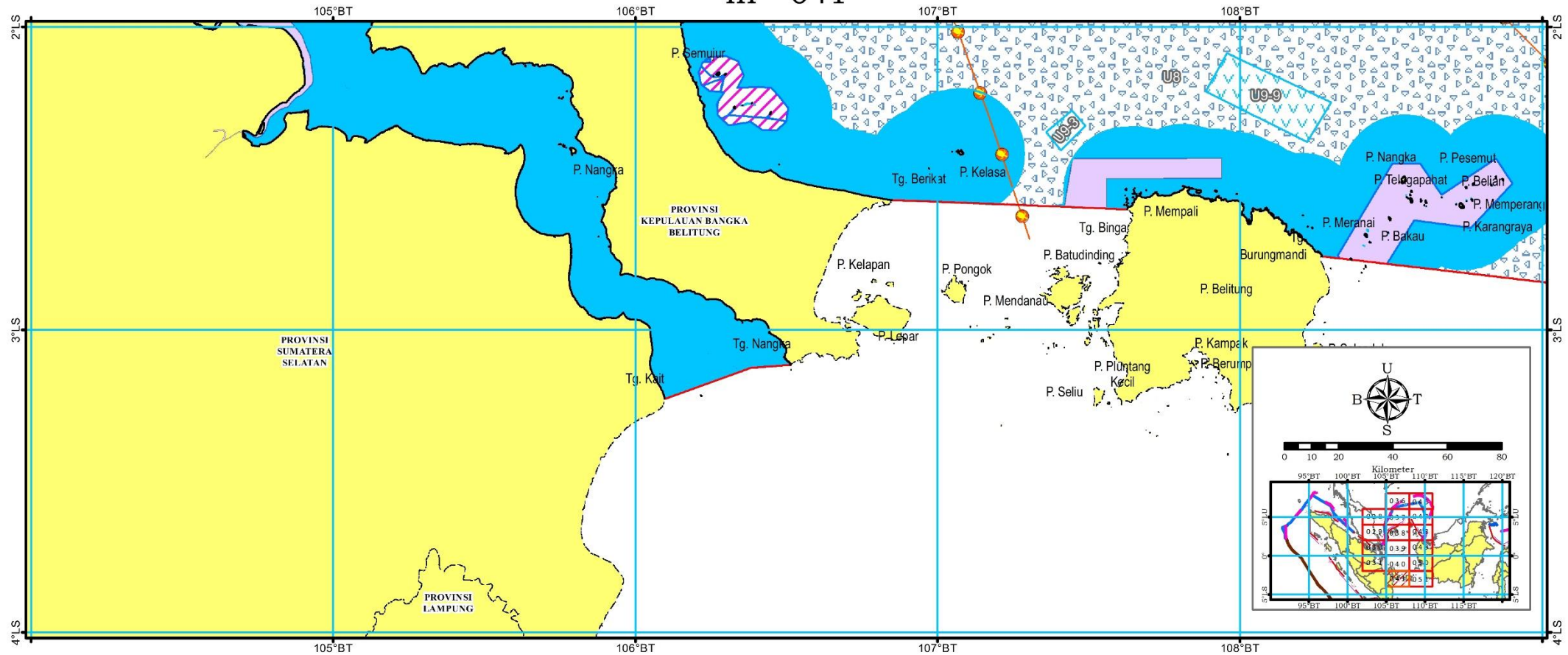
III - 040





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

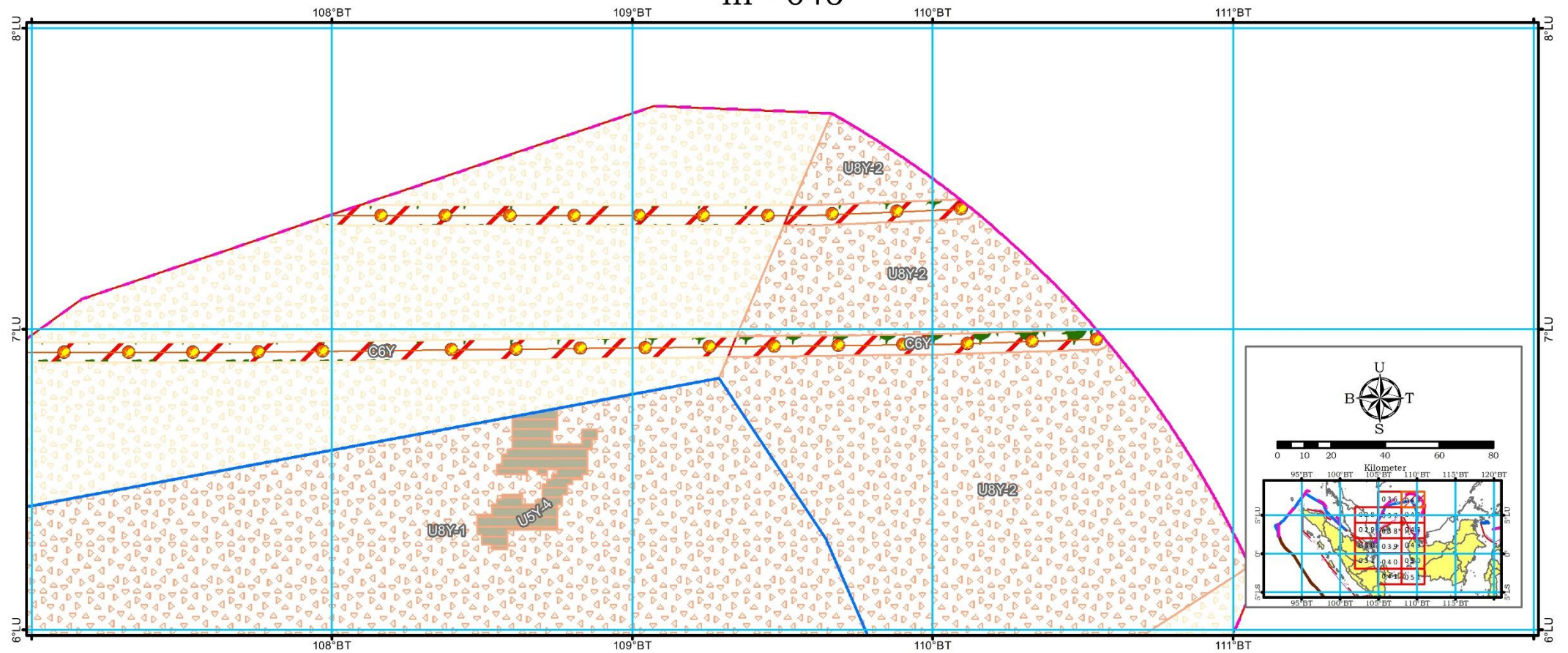
III - 041





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

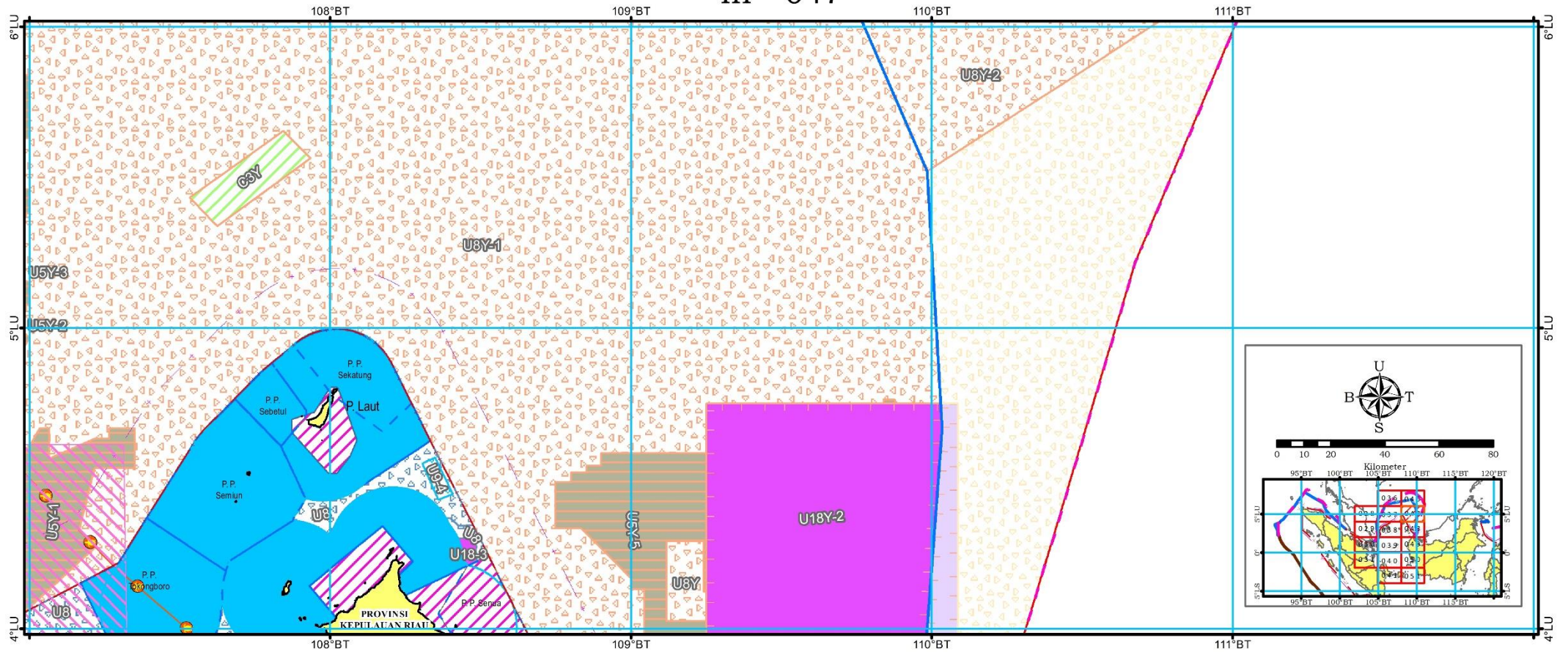
III - 046





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

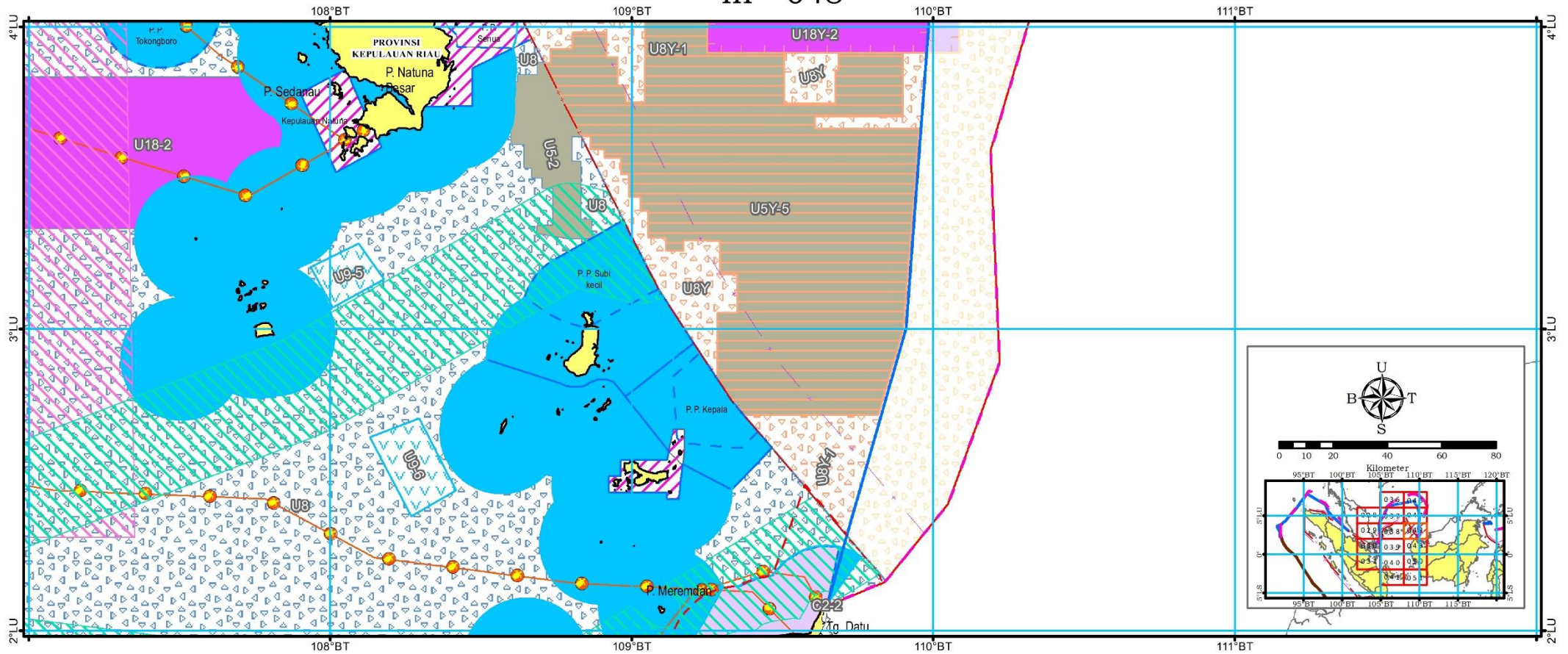
III - 047





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

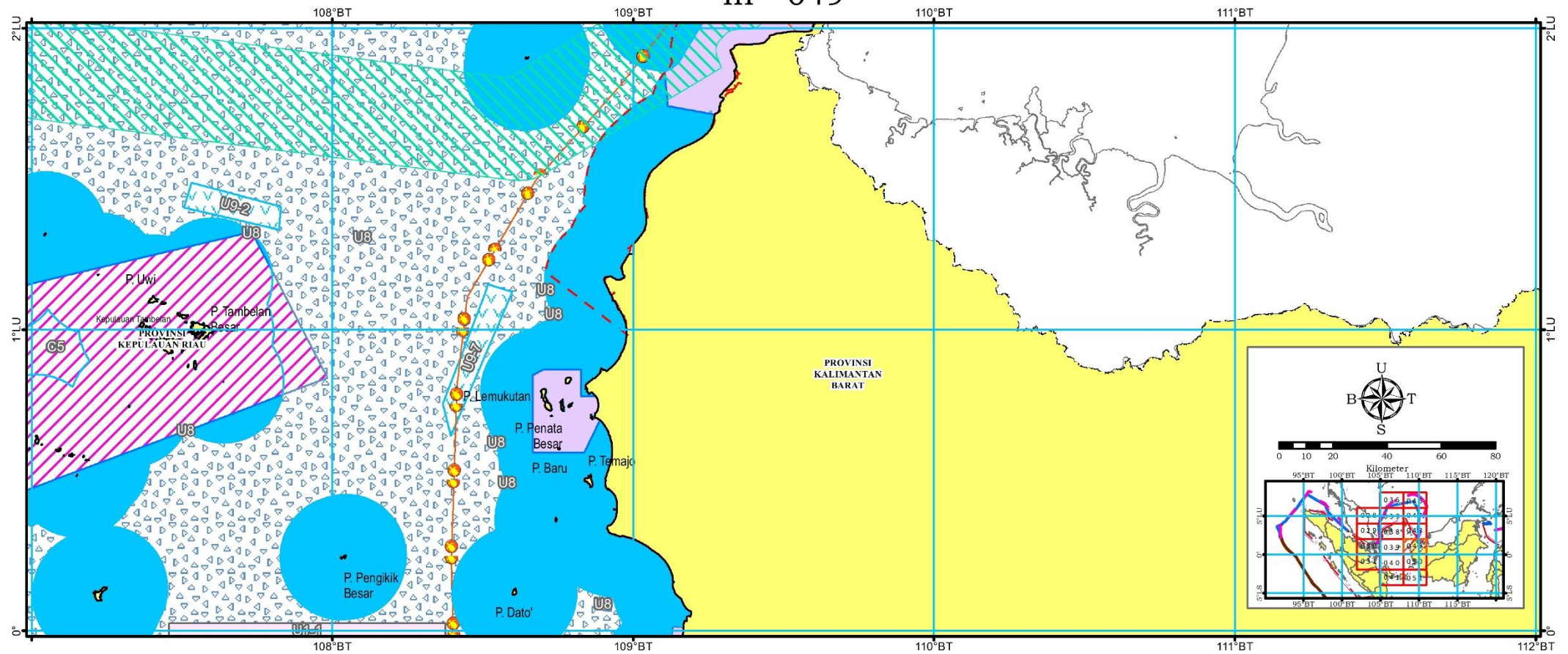
III - 048





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

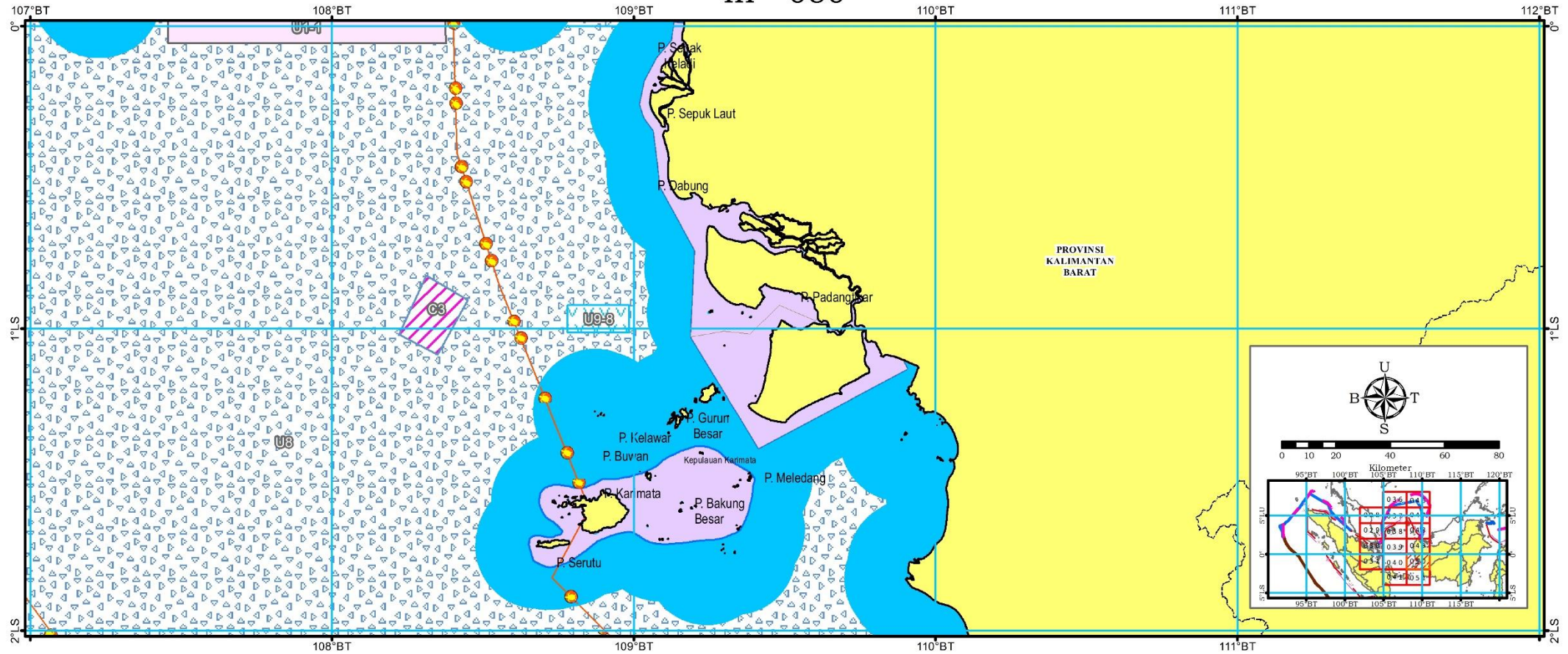
III - 049





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

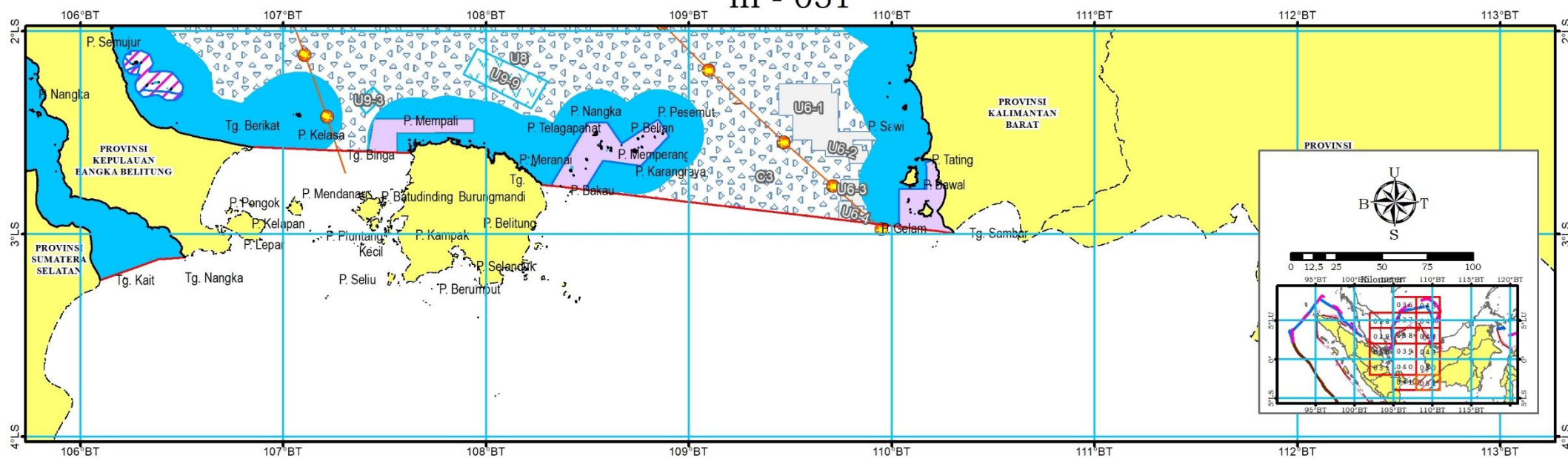
III - 050





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III - 051



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



DEPUTI DIRJEN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Dia Silvanna Djaman

SK No 002788 C